



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2021**



**WONOGIRI
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban bagi instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja kegiatan dan sasaran yang mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2021 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, yang sekaligus merupakan rangkaian pelaksanaan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengemban visi, misi dan tujuan organisasi. LKjIP ini sekaligus merupakan parameter yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana perencanaan strategik yang ditetapkan tersebut dapat mewujudkan

sasaran dan tujuan yang diharapkan tercapai.

Penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri ini telah dapat mencerminkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021.

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Gambaran Umum Sekretariat DPRD	I-2
C. Tugas dan Fungsi	1-5
D. Isu Strategis	1-5
E. Landasan Hukum	I-6
F. Sistematika	I-6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
A. Rencana Strategis	II-1
B. Indikator Kinerja Utama	II-3
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	II-3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.	III-1
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	III-1
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	III-3
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja SasaranStrategis	III-4
BAB IV PENUTUP	IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat DPRD selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi, dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD sesuai Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 70 Tahun 2016 mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, Sekretaris DPRD memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dengan membawahi Bagian, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas masing-masing bagian sebagai berikut:

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi bidang Kepegawaian Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD, fasilitasi Peningkatan Kapasitas anggota DPRD, Fasilitasi Fraksi, Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga, sarana dan prasarana serta pengelolaan aset.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi bidang kepegawaian Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD;
- b. Pelaksanaan fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan anggota DPRD.
- c. Pelaksanaan penyediaan fasilitasi sarana prasarana dan tenaga ahli fraksi;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga di lingkungan Sekretariat PRD;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana di lingkungan Sekretariat DPRD;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan aset di lingkungan Sekretariat DPRD; dan

- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Umum membawahi 2 (dua) sub bagian dengan tugas masing masing Sub Bagian sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan administrasi bidang Kepegawaian Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD, fasilitasi kunjungan kerja, peningkatan kapasitas aparatur dan anggota DPRD, fasilitasi alat kelengkapan Komisi DPRD dan fasilitasi sarana prasarana dan tenaga ahli fraksi.

- b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan administrasi bidang pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga, sarana dan prasarana serta pengelolaan aset.

Masing masing sub bagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bagian Umum

2. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi bidang Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan di lingkungan Sekretariat DPRD;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD;
- c. Pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Pimpinan, Anggota DPRD; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi 2 (dua) Sub Bagian dengan tugas masing-masing Sub Bagian sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Perencanaan

Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi

perencanaan dan pelaporan di lingkungan Sekretariat DPRD.

b. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD.

Masing-masing sub bagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bagian Perencanaan Keuangan.

3. Bagian Persidangan

Bagian Persidangan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi bidang Persidangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Persidangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi pembahasan Raperda dan non Raperda;
- c. Pelaksanaan verifikasi, koordinasi, mengevaluasi dan penyusunan risalah rapat serta Daftar Inventaris Masalah (DIM);
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan penyerapan aspirasi DPRD;
- e. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan publikasi, protokol dan kehumasan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh SEKWAN sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Persidangan, membawahi 2 (dua) Sub Bagian dan tugas masing Sub Bagian sebagai berikut:

a. Sub Bagian Risalah.

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyelenggaraan kajian perundang-undangan, koordinasi pembahasan Raperda dan non Raperda, verifikasi, koordinasi, mengevaluasi dan penyusunan risalah rapat serta daftar Inventaris Masalah (DIM);

b. Sub Bagian Humas dan Protokol

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bahan fasilitasi penyelenggaraan penyerapan aspirasi DPRD, persidangan, dan penyelenggaraan publikasi, protokol dan kehumasan.

4. Bagian Produk Hukum dan Dokumentasi

Bagian Produk Hukum dan Dokumentasi mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi bidang produk dan dokumentasi hukum, perpustakaan dan fasilitasi penyediaan tenaga ahli.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Produk Hukum dan Dokumentasi mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda Inisiatif;
- b. Pelaksanaan penyiapan pengumpulan bahan draf Raperda Inisiatif;
- c. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan analisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi bantuan hukum;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan perpustakaan dan dokumentasi hukum; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Produk Hukum dan Dokumentasi, membawahi 2 (dua) Sub Bagian dan tugas masing-masing Sub Bagian sebagai berikut:

a. Sub Bagian Produk Hukum

SubBagian Produk Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda Inisiatif, pengumpulan bahan draf Raperda Inisiatif, Keputusan DPRD/Pimpinan, Fasilitasi Raperda Inisiatif serta fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah.

b. Sub Bagian Dokumentasi Hukum

Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli, penyelenggaraan fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi hukum.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas dan kewajiban menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinir tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Penyelenggaraan Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

D. Isu Strategis

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan serta peraturan perundang-undangan secara nasional maupun regional yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, terutama kondisi kebijakan politik
2. Reformasi birokrasi secara terus menerus membuka peluang bagi peningkatan profesionalisme aparat serta nilai-nilai demokratis, partisipatif, transparansi, akuntabel. Terbukanya peluang pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, bingkai dan sejenisnya
3. Pesatnya perkembangan teknologi informasi menciptakan percepatan arus informasi yang tak terbatas ruang dan waktu. Memberikan peluang bagi masyarakat untuk menggunakan semua kebutuhan informasi yang dikehendaki. Akses program dan kegiatan di SKPD bisa di ketahui oleh masyarakat, hal ini menunjukkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan.

4. Adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mulai diberlakukan pada tanggal 30 April 2010. Memberikan konsekuensi logis terhadap pembentukan Peraturan Daerah tentang keterbukaan informasi publik, yang menjadi sarana dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik
5. Diperlukan hubungan yang baik antara pihak legislative dan eksekutif, agar selalu tercipta keadaan yang kondusif, harmonis, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan.

E. Landasan Hukum

LKjIP Kabupaten Wonogiri ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati Wonogiri terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri dan stakeholder.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Wonogiri dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Wonogiri yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 adalah :

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri : “PELAYANAN ADMINISTRASI YANG BERKUALITAS KEPADA ANGGOTA DPRD”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Wonogiri

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 sebanyak satu sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Peran dan Fungsi DPRD Kabupaten Wonogiri	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Setiap Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	70	72	76	78	80

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Setiap Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	sesuai dengan pp, hasil kajian, kesepa katan masyarakat	(Jumlah anggota DPRD yang puas dibagi jumlah anggota DPRD seluruhnya) dikalikan 100%	

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan

perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Setiap Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	80

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas

indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri
Tahun 2021**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat

pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021, telah ditetapkan sebanyak satu sasaran dan sebanyak satu indikator kinerja (*outcomes*) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran satu terdiri dari satu indikator

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Setiap Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	80%

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	80	100	125

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD, dengan capaian kinerja 125 %.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 sebanyak satu sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD, dari sebanyak satu sasaran strategis dengan sebanyak satu indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	80	100	125

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	100.00 %
2	Sesuai Target	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak satu Sasaran di atas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00
	Jumlah	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00

Dari sebanyak satu sasaran dengan sebanyak satu indikator kinerja, pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- **Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.**

Kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar 100% dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 80% sehingga capaian yang diperoleh adalah sebesar 125%.

- **Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.**

Jika dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya (tahun 2021) yaitu sebesar 100%, maka kinerja tahun 2020 sebesar 100% adalah sama dengan kinerja tahun sebelumnya.

- **Kinerja nyata dengan target akhir renstra.**

Kinerja tahun 2021 adalah sebesar 100%, capaian yang diperoleh sebesar 100% jika dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu sebesar 80% maka realisasi tahun ini melebihi dari target akhir renstra

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi anggaran serta target dan realisasi kinerja kegiatan indikator berdasarkan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

- **Pagu dan realisasi anggaran program dan kegiatan tahun anggaran 2021**

Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 SEKRETARIAT DPRD				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2021	Triwulan 4	
			Realisasi	%
1	2	3	4	5
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Fasilitas Setiap Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.643.111.070	27.905.260.756	81
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.814.129	41.690.297	73
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.599.581	37.489.197	74
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.214.548	4.201.100	68
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.254.151.341	3.653.534.111	86
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.214.162.807	3.620.937.161	86
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.996.123	4.195.050	84
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.996.569	3.653.800	73
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.999.154	4.394.700	88
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.999.341	7.720.050	77
8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	4.999.649	4.122.850	82

	Pemeriksaan			
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.998.296	4.526.100	91
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.999.402	3.984.400	80
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	202.954.445	183.071.562	90
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32.965.000	30.845.000	94
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	169.989.445	152.226.562	90
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.218.793.538	1.089.289.809	89
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.981.255	4.760.000	96
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	794.980.785	703.459.835	88
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	73.867.202	68.912.990	93
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	29.992.100	100
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.998.362	68.167.000	97
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	104.999.784	102.251.620	97
19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	89.973.500	62.370.000	69
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.992.650	49.376.264	99
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.224.750	14.044.750	87
21	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.224.750	1.224.750	100
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	12.820.000	85
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	756.584.571	603.101.442	80
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	4.531.000	91
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	287.999.973	176.790.812	61
26	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.560.000	22.727.870	80
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	435.024.598	399.051.760	92
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	609.060.800	601.651.100	99

28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	153.862.500	153.860.500	100
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138.047.500	137.425.800	100
30	Pemeliharaan Mebel	14.907.200	14.880.000	100
31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.926.000	24.695.000	99
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	154.809.600	154.705.000	100
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	122.508.000	116.084.800	95
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	134.269.477	110.251.120	82
34	Fasilitasi Keprotokolan	49.999.386	35.970.160	72
35	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	39.499.399	39.206.160	99
36	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	44.770.692	35.074.800	78
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	27.125.523.256	21.350.142.145	79
37	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	26.400.527.000	20.752.597.295	79
38	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	449.998.400	394.325.100	88
39	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	274.997.856	203.219.750	74
	Layanan Administrasi DPRD	268.734.763	258.484.420	96
40	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	9.989.524	9.923.000	99
41	Fasilitasi Fraksi DPRD	33.745.239	23.581.420	70
42	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	225.000.000	224.980.000	100
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	13.115.748.845	11.218.898.269	86
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.217.175.297	3.068.068.552	95
43	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	337.436.209	329.963.954	98
44	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	811.899.784	717.978.950	88
45	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	2.067.839.304	2.020.125.648	98
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	546.132.930	492.101.420	90
46	Pembahasan KUA dan PPAS	87.341.735	70.309.630	80
47	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	82.125.319	71.399.790	87

48	Pembahasan APBD	25.562.113	20.387.000	80
49	Pembahasan APBD Perubahan	25.940.637	21.243.750	82
50	Pembahasan Laporan Semester	2.215.301	1.199.700	54
51	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	322.947.825	307.561.550	95
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	703.170.797	543.775.500	77
52	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	19.999.942	2.703.000	14
53	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	19.999.796	3.419.500	17
54	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	19.999.788	1.941.500	10
55	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	20.999.793	4.324.300	21
56	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	19.998.201	2.795.500	14
57	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	33.601.855	29.070.800	87
58	Pengawasan Penggunaan Anggaran	256.636.553	197.390.700	77
59	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	311.934.869	302.130.200	97
	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.955.750.780	3.306.129.918	84
60	Bimbingan Teknis DPRD	2.324.993.827	1.974.624.797	85
61	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	371.999.545	282.589.600	76
62	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	19.999.477	19.857.000	99
63	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	308.448.960	285.548.302	93
64	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	295.999.879	179.417.000	61
65	Penyusunan Program Kerja DPRD	634.309.092	564.093.219	89
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.149.443.593	960.065.220	84
66	Kunjungan Kerja dalam Daerah	8.395.200	190.000	2
67	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	245.955.229	224.736.700	91
68	Pelaksanaan Reses	895.093.164	735.138.520	82
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	528.437.331	517.806.977	98
69	Penyusunan Kode Etik DPRD	199.999.629	195.863.111	98
70	Pengawasan Kode Etik DPRD	328.437.702	321.943.866	98

	Fasilitasi Tugas DPRD	3.015.638.117	2.330.950.682	77
71	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.099.995.630	1.872.587.946	89
72	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	115.663.269	107.062.558	93
73	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	299.999.930	155.766.500	52
74	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	499.979.288	195.533.678	39
Total Per Sasaran		47.758.859.915	39.124.159.025	82
Grand Total		47.758.859.915	39.124.159.025	82

• **Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun anggaran 2021**

No	PROGRAM	No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.1	% kelengkapan dokumen dan ketepatan waktu pelaporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, dan administrasi umum	%	80	78	97,50
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	2.1	%Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	%	80	75	93,75

• **Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun anggaran 2021**

No	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.643.111.070					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.814.129					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.599.581	Dokumen DPA	dokumen	1	1	100
			Dokumen DPPA	dokumen	1	1	100
			Dokumen Renstra dan Renja	dokumen	2	2	100
			Dokumen RKA	dokumen	1	1	100
			Dokumen RKA P	dokumen	1	1	100
			Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi	kali	3	3	100
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.214.548	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	1	1	100

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.254.151.341					
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.214.162.807	Dokumen administrasi gaji dan tunjangan ASN	dokumen	14	14	100
			Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan	14	14	100
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.996.123	Dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	14	14	100
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.996.569	Bahan pelaksanaan verifikasi	dokumen	2	2	100
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.999.154	Dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan	dokumen	3	3	100
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.999.341	Dokumen Keuangan Akhir Tahun	dokumen	1	1	100
8	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.999.649	Dokumen bahan tanggapan pemeriksaan	dokumen	1	1	100
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.998.296	Dokumen laporan keuangan Bulanan/Semesteran	dokumen	14	14	100
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.999.402	Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1	1	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	202.954.445					
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32.965.000	tersedianya pakaian dinas ASN	orang	40	40	100
			tersedianya pakaian kerja lapangan tenaga keamanan dan kebersihan	orang	10	10	100
			tersedianya pakaian Korpri ASN	orang	40	40	100
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	169.989.445	terselenggaranya bintek / Workshop	orang	25	15	60
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.218.793.538					
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.981.255	tersedianya penerangan bangunan kantor	tahun	1	1	100
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	794.980.785	tersedianya alat tulis kantor	paket	2	2	100
			tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	paket	3	4	133
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	73.867.202	tersedianya peralatan rumah tangga	tahun	1	1	100
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	tersedianya alat tulis Kantor	bulan	12	12	100

17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.998.362	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	tahun	1	1	100
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	104.999.784	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12	12	100
19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	89.973.500	tersedianya makanan dan minuman harian dan tamu	bulan	12	12	100
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.992.650	terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah	OK	40	40	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.224.750					
21	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.224.750	tersedianya alat angkutan darat	unit	3	0	0
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	tersedianya peralatan gedung kantor	unit	10	0	0
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	terpeliharanya sarana dan prasarana DPRD	bulan	12	12	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	756.584.571					
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	tersedianya jasa surat menyurat	bulan	12	12	100
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	287.999.973	Tersedianya jasa komunikasi, telepon, air dan listrik	bulan	12	12	100
26	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.560.000	tersedianya jasa sewa foto copy	bulan	12	12	100
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	435.024.598	tersedianya jasa kebersihan kantor	bulan	12	12	100
			Pembayaran honor tenaga kerja non pegawai	OB	192	210	109
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	609.060.800					
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	153.862.500	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara	unit	6	10	167
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138.047.500	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	tahun	1	1	100
30	Pemeliharaan Mebel	14.907.200	Terpeliharanya mebelair kantor	bulan	12	12	100
31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.926.000	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	bulan	12	12	100

32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	154.809.600	Rehab Ruang BK	paket	2	2	100
			Terpeliharanya Gedung Kantor	tahun	1	1	100
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	122.508.000	Rehabilitasi pagar gedung kantor dan penampungan air	unit	1	1	100
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	134.269.477					
34	Fasilitasi Keprotokolan	49.999.386	Fasilitasi keprotokolan untuk pimpinan	bulan	12	12	100
35	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	39.499.399	Fasilitasi komunikasi pimpinan	bulan	12	12	100
36	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	44.770.692	Jumlah fasilitasi pendokumentasian tugas pimpinan	bulan	12	12	100
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	27.125.523.256					
37	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	26.400.527.000	Dokumen administrasi keuangan DPRD	dokumen	14	14	100
			Iuran Organisasi Asdeski dan Adkasi	kali	2	1	50
			Pembayaran gaji dan tunjangan DPRD	bulan	14	14	100
38	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	449.998.400	Terpenuhinya kebutuhan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	tahun	1	1	100
39	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	274.997.856	Terlaksananya Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD Wonogiri	orang	50	40	80
	Layanan Administrasi DPRD	268.734.763					
40	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	9.989.524	Data Anggota DPRD	dokumen	1	1	100
41	Fasilitasi Fraksi DPRD	33.745.239	Terselenggaranya rapat fraksi DPRD	Bulan	12	12	100
42	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	225.000.000	terselenggaranya rapat DPRD	bulan	12	12	100
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	13.115.748.845					
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.217.175.297					
43	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	337.436.209	Jumlah Penyusunan dan Pembahasan Propemperda	Dokumen	1	1	100
44	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	811.899.784	Tersusunnya Rancangan Perda	Paket	2	2	100

45	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	2.067.839.304	Jumlah kajian	kali	9	9	100
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	546.132.930				0	
46	Pembahasan KUA dan PPAS	87.341.735	Terfasilitasinya pembahasan KUA dan PPAS	kali	1	1	100
47	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	82.125.319	Terfasilitasinya pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	kali	1	1	100
48	Pembahasan APBD	25.562.113	Terfasilitasinya pembahasan APBD	kali	1	1	100
49	Pembahasan APBD Perubahan	25.940.637	Terfasilitasinya pembahasan APBD Perubahan	kali	1	1	100
50	Pembahasan Laporan Semester	2.215.301	Jumlah fasilitasi pembahasan laporan semester	kali	1	1	100
51	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	322.947.825	Terfasilitasinya pembahasan pertanggungjawaban APBD	dokumen	1	1	100
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	703.170.797					
52	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	19.999.942	Terfasilitasinya pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	kali	3	0	0
53	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	19.999.796	Terfasilitasinya pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	kali	2	1	50
54	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	19.999.788	Terfasilitasinya pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	kali	3	1	33
55	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	20.999.793	Terfasilitasinya pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	kali	3	0	0
56	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	19.998.201	Terfasilitasinya pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam	kali	2	1	50
57	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	33.601.855	Fasilitasi Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	kali	1	1	100
58	Pengawasan Penggunaan Anggaran	256.636.553	Rekomendasi penggunaan anggaran	dokumen	1	1	100

59	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	311.934.869	Rekomendasi atas LKPJ Kepala Daerah yang dibahas	dokumen	1	1	100
	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.955.750.780					
60	Bimbingan Teknis DPRD	2.324.993.827	Jumlah fasilitasi pendalaman tugas (Bimtek/Workshop) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	OK	300	288	96
61	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	371.999.545	Terpublikasikannya kinerja/kegiatan DPRD	kali	3	3	100
62	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	19.999.477	Jumlah Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	orang	3	2	67
63	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	308.448.960	Jumlah Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Orang	5	5	100
64	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	295.999.879	Terfasilitasinya penyelenggaraan hubungan masyarakat	bulan	12	12	100
65	Penyusunan Program Kerja DPRD	634.309.092	Dokumen Program Kerja dan Renja DPRD	dokumen	2	2	100
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.149.443.593					
66	Kunjungan Kerja dalam Daerah	8.395.200	Terfasilitasinya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	kali	12	1	8
67	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	245.955.229	Tersusunnya pokok-pokok pikiran DPRD	dokumen	1	1	100
68	Pelaksanaan Reses	895.093.164	Terfasilitasinya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	kali	3	3	100
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	528.437.331					
69	Penyusunan Kode Etik DPRD	199.999.629	Tersusunnya Peraturan DPRD (Kode Etik dan Tata Beracara)	Dokumen	1	1	100
70	Pengawasan Kode Etik DPRD	328.437.702	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan tugas anggota DPRD	Kali	1	1	100
	Fasilitasi Tugas DPRD	3.015.638.117					
71	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.099.995.630	Jumlah fasilitasi koordinasi dan konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	kali	10	10	100
72	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	115.663.269	Tersusunnya Peraturan DPRD (Kode Etik dan Tata Beracara)	dokumen	1	1	100
73	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	299.999.930	Jumlah fasilitasi koordinasi dan konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	bulan	12	12	100

74	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	499.979.288	Jumlah fasilitasi koordinasi dan konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	kali	6	9	150
		47.758.859.915					

● Efisiensi

Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 SEKRETARIAT DPRD					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2021	Triwulan 4		
			Realisasi	Efisiensi	%
1	2	3	4		5
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Setiap Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.643.111.070	27.905.260.756	6.737.850.314	19
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.814.129	41.690.297	15.123.832	27
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.599.581	37.489.197	13.110.384	26
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.214.548	4.201.100	2.013.448	32
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.254.151.341	3.653.534.111	600.617.230	14
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.214.162.807	3.620.937.161	593.225.646	14
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.996.123	4.195.050	801.073	16
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.996.569	3.653.800	1.342.769	27
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.999.154	4.394.700	604.454	12
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.999.341	7.720.050	2.279.291	23
8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.999.649	4.122.850	876.799	18
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4.998.296	4.526.100	472.196	9
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.999.402	3.984.400	1.015.002	20
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	202.954.445	183.071.562	19.882.883	10
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32.965.000	30.845.000	2.120.000	6
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	169.989.445	152.226.562	17.762.883	10
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.218.793.538	1.089.289.809	129.503.729	11
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.981.255	4.760.000	221.255	4
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	794.980.785	703.459.835	91.520.950	12
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	73.867.202	68.912.990	4.954.212	7
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	29.992.100	7.900	0
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.998.362	68.167.000	1.831.362	3
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	104.999.784	102.251.620	2.748.164	3
19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	89.973.500	62.370.000	27.603.500	31
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.992.650	49.376.264	616.386	1

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.224.750	14.044.750	2.180.000	13
21	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.224.750	1.224.750	0	0
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	0
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	12.820.000	2.180.000	15
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	756.584.571	603.101.442	153.483.129	20
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	4.531.000	469.000	9
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	287.999.973	176.790.812	111.209.161	39
26	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.560.000	22.727.870	5.832.130	20
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	435.024.598	399.051.760	35.972.838	8
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	609.060.800	601.651.100	7.409.700	1
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	153.862.500	153.860.500	2.000	0
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138.047.500	137.425.800	621.700	0
30	Pemeliharaan Mebel	14.907.200	14.880.000	27.200	0
31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.926.000	24.695.000	231.000	1
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	154.809.600	154.705.000	104.600	0
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	122.508.000	116.084.800	6.423.200	5
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	134.269.477	110.251.120	24.018.357	18
34	Fasilitasi Keprotokolan	49.999.386	35.970.160	14.029.226	28
35	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	39.499.399	39.206.160	293.239	1
36	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	44.770.692	35.074.800	9.695.892	22
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	27.125.523.256	21.350.142.145	5.775.381.111	21
37	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	26.400.527.000	20.752.597.295	5.647.929.705	21
38	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	449.998.400	394.325.100	55.673.300	12
39	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	274.997.856	203.219.750	71.778.106	26
	Layanan Administrasi DPRD	268.734.763	258.484.420	10.250.343	4
40	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	9.989.524	9.923.000	66.524	1
41	Fasilitasi Fraksi DPRD	33.745.239	23.581.420	10.163.819	30
42	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	225.000.000	224.980.000	20.000	0
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	13.115.748.845	11.218.898.269	1.896.850.576	14
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.217.175.297	3.068.068.552	149.106.745	5
43	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	337.436.209	329.963.954	7.472.255	2
44	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	811.899.784	717.978.950	93.920.834	12
45	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	2.067.839.304	2.020.125.648	47.713.656	2
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	546.132.930	492.101.420	54.031.510	10
46	Pembahasan KUA dan PPAS	87.341.735	70.309.630	17.032.105	20

47	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	82.125.319	71.399.790	10.725.529	13
48	Pembahasan APBD	25.562.113	20.387.000	5.175.113	20
49	Pembahasan APBD Perubahan	25.940.637	21.243.750	4.696.887	18
50	Pembahasan Laporan Semester	2.215.301	1.199.700	1.015.601	46
51	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	322.947.825	307.561.550	15.386.275	5
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	703.170.797	543.775.500	159.395.297	23
52	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	19.999.942	2.703.000	17.296.942	86
53	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	19.999.796	3.419.500	16.580.296	83
54	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	19.999.788	1.941.500	18.058.288	90
55	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	20.999.793	4.324.300	16.675.493	79
56	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	19.998.201	2.795.500	17.202.701	86
57	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	33.601.855	29.070.800	4.531.055	13
58	Pengawasan Penggunaan Anggaran	256.636.553	197.390.700	59.245.853	23
59	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	311.934.869	302.130.200	9.804.669	3
	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.955.750.780	3.306.129.918	649.620.862	16
60	Bimbingan Teknis DPRD	2.324.993.827	1.974.624.797	350.369.030	15
61	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	371.999.545	282.589.600	89.409.945	24
62	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	19.999.477	19.857.000	142.477	1
63	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	308.448.960	285.548.302	22.900.658	7
64	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	295.999.879	179.417.000	116.582.879	39
65	Penyusunan Program Kerja DPRD	634.309.092	564.093.219	70.215.873	11
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.149.443.593	960.065.220	189.378.373	16
66	Kunjungan Kerja dalam Daerah	8.395.200	190.000	8.205.200	98
67	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	245.955.229	224.736.700	21.218.529	9
68	Pelaksanaan Reses	895.093.164	735.138.520	159.954.644	18
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	528.437.331	517.806.977	10.630.354	2
69	Penyusunan Kode Etik DPRD	199.999.629	195.863.111	4.136.518	2
70	Pengawasan Kode Etik DPRD	328.437.702	321.943.866	6.493.836	2
	Fasilitasi Tugas DPRD	3.015.638.117	2.330.950.682	684.687.435	23
71	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.099.995.630	1.872.587.946	227.407.684	11
72	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	115.663.269	107.062.558	8.600.711	7
73	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	299.999.930	155.766.500	144.233.430	48
74	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	499.979.288	195.533.678	304.445.610	61
Total Per Sasaran		47.758.859.915	39.124.159.025	8.634.700.890	18
Grand Total		47.758.859.915	39.124.159.025	8.634.700.890	18

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 125 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 47.758.859.915,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 39.124.159.025,00 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 8.634.700.890,00

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri 2016-2021 menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja

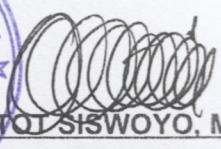
tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 5 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2021, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 125%.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 39.124.159.025,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus dua puluh empat juta seratus lima puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri adalah 82% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Wonogiri.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Tahun 2021 ini menggunakan dasar perencanaan sesuai Reviu Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021, namun demikian nomenklatur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan mengacu dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Wonogiri.

Wonogiri, Januari 2022
Sekretaris DPRD Kabupaten Wonogiri

Ir. GATOT SISWOYO, M.M.
NIP. 19631020 198909 1 001

